

MANAJEMEN GURU
(ANALISIS TERHADAP MENAJEMEN PENDIDIKAN,
PROBLEMATIKA DAN TANTANGANNYA)

Ali Akbarjono

***Abstraction** : Teacher is one of important sources in education but he or she is still undermanaged or even mismanaged. That's why teacher management should be organized from selection process, teacher recruit, the development of teacher's ability as educator, and teacher's motivation to have nigh commitment in his/her job. In reality, teacher's profession has displace ment from many factors sich as bad teacher's talent, and etc. To over come those problems, it is hoped from teacher trainer education organization to be more active to educate him or her so that he or she becomes professional teacher.*

Kata Kunci: Manajemen, Guru, Profesionalisme

A. Pendahuluan

Bagi negara berkembang seperti Indonesia tampaknya tidak mudah untuk merumuskan konsep pendidikan secara tepat dan benar. Ada kebingungan dan kebimbangan antara menjadi pendidikan sebagai alat dan tujuan. Berbagai perubahan dalam penyusunan kebijakan, arah, dan tujuan pendidikan yang terjadi dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa kita masih bingung merumuskan konsep pendidikan. Memperlakukan dunia pendidikan seperti layaknya dunia usaha makin memperjelas kebingungan kita dalam menyikapi masalah dunia pendidikan.

Pendidikan memang bukan hanya merupakan tugas negara, juga menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi negara harus sungguh-sungguh menjadikan pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Pencerdasan kehidupan bangsa hanya dapat dilakukan melalui pendidikan yang benar.

Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa yang membutuhkan sosok-sosok guru yang profesional dan mapan secara ekonomi. Dengan

memperhatikan aspek kesejahteraan guru, maka guru pun akan bekerja secara profesional dan dedikatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Munculnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menggariskan kebijakan profesionalisasi guru seakan menjadi angin segar bagi perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Proses peningkatan kemampuan guru dalam mencapai kriteria standar profesi ini tidak serta merta berjalan optimal. Kendala-kendala masih dijumpai terkait harga yang harus dibayar oleh guru untuk menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi, misalnya menempuh pendidikan S1.

Akan tetapi bagi guru-guru yang tingkat penghasilannya relatif rendah akan berpikir dua kali, apalagi dengan tanggungan keluarga yang harus dibiayai. Mengamati kenyataan ini alangkah lebih adil jika pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, selain menuntut profesionalisme guru. Tingkat kesejahteraan guru yang terjamin akan berbanding lurus dengan profesionalisme guru. Guru-guru tidak lagi kesulitan untuk dapat membeli buku-buku yang terkait dengan bidang profesinya. Kegiatan-kegiatan ilmiah dan berbagai jenis kegiatan peningkatan kapasitas lainnya diikuti guru tanpa harus berpikir kekurangan kebutuhan finansial untuk mengepul asap dapur. Terkait dengan moralitas banyak ditemui guru-guru yang justru tidak mencerminkan sikap dan perilaku terpuji, sehingga tidak layak lagi untuk diteladani siswa-siswanya. Tingkat kesejahteraan guru yang kurang terjamin memaksa guru untuk mencari kerja sambilan, sehingga melemahkan konsentrasinya pada peningkatan kualitas dan kapasitas dirinya. Guru berkecenderungan untuk mengajar dan mendidik siswa ala kadarnya, bahkan sekadar masuk kelas tanpa target belajar yang jelas dan terarah.

Dengan kondisi saat ini di negara yang memiliki ideologis yang merakyat (demokrasi) ini ternyata guru merupakan salah satu komponen yang paling lemah terutama dalam sistem birokrasi pendidikan nasional. Kondisi ini menurut Zakaria Sabil dalam suatu perkuliahan menyebutkan bahwa kondisi guru Indonesia pada umumnya telah berada pada stigma yang

agak lari dari peran dan tugas guru yang sebenarnya, yaitu Tenaga kependidikan(guru);

- Guru merupakan salah satu komponen yang terpenting dari komponen sumber daya manusia lainnya yang ada di suatu sistem pendidikan
- Sebab guru dipandang sebagai kunci keberhasilan dari segenap upaya peningkatan mutu pendidikan. Dan tidak ada satu pun inovasi di bidang pendidikan yang pernah diintrodusir pemerintah yang bisa terlepas dari faktor guru untuk mensukseskannya. (*Zakaria Sabil: slide materi kuliah Anatomi pendidikan, 2006*)

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tanggung jawab sepenuhnya terhadap kondisi dan problematika guru di negara kita saat ini secara gamblang bisa dikatakan sangat tertumpu pada kebijakan pemerintah sendiri meskipun nantinya melimpah tugas kepada perpanjangan tangannya, yaitu Departemen Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini pemerintah sendiri telah mengakui bahwa problematika guru di tanah air pada umumnya dilematis sebagaimana pernyataan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPT) Fasli Jalal, "*Setidaknya ada beberapa masalah guru. Pertama adalah kekurangan guru. Kemudian, distribusinya kurang merata. Lalu, rendahnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,*" (<http://www.jawapos.co.id/index.php>)

Namun konteks ini, permasalahan yang terkait dengan rendahnya kompetensi, kesejahteraan, serta manajemen pendidikan yang belum tertata secara baik, soal kekurangan guru dan fenomena perekrutan guru yang riil di lapangan. Secara teori Sabil menguraikan aspek yang harus diperhatikan oleh pemegang kebijakan publik (pemerintah) dalam meningkatkan SDM guru, yaitu ; Perencanaan sumber daya manusia, Rekrutmen, Seleksi, Pengangkatan dan penempatan, Induksi, Pembinaan karir, Kompensasi atau pengajian, Penilaian kinerja, Mutasi, dan pengsiun (*Zakaria Sabil: slide materi kuliah Anatomi pendidikan, 2006*)

B. Profesi Guru

Keberhasilan proses pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan guru. Guru merupakan pelaku utama di sekolah formal untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian yang baik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, sehat jasmani dan rohani serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Terhadap kewajiban ini, maka dalam leksikon Jawa, kata guru sering diakronimkan dengan ungkapan ”*digugu lan ditiru*”. Sosok guru adalah orang yang dapat dipercaya dan diteladani oleh para siswanya.

Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, akan tetapi juga harus memiliki pengetahuan, kemampuan profesional dan moral. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan kepada anak didiknya. dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas (Soetjipto, 2004 : 42-43).

Jadi guru merupakan pemegang peranan utama dalam proses belajar mengajar dimana berlansungnya proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa dengan dasar hubungan timbal balik yang berlansung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga keberadaan dan tanggungjawab seorang guru begitu besar konon lagi kita bisa asumsikan bahwa pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang apalagi yang tidak memiliki keahlian dan kualifikasi profesionalisme seorang guru.

Oleh karenanya sesuai dengan apa yang diklaim oleh Ahmad Sabri (*Strategi belajar mengajar ;micro teaching :68*) bahwa untuk menjadi seorang guru harus memiliki keahlian khusus karena guru merupakan jabatan atau

profesi, seorang guru memiliki banyak tugas baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas yaitu dalam bentuk pengabdian, tugas guru dalam proses belajar meliputi tugas paedagogis dan tugas adminisstrasi.

Seiring dengan lajunya perkembangan zaman dan dinamika kondisi pendidikan yang menuntut lebih agresif terutama memberi konsekuensi logis kepada guru untuk meningkatkan peran dan kopotensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kopetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dankan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.

Menyingkapi kondisi dan peran seorang guru yang paling dominan dalam proses belajar-mengajar, Sabri mengklasifikasikan peran guru ,sbb: (1) Guru sebagai demonstrator; (2) Guru sebagai pengelola kelas; (3) Guru sebagai mediator dan fasilitator; (4) Guru sebagai evaluator; (5) peran guru dalam pengabministrasian; (6) Peran guru secara pribadi; (7) Peran guru secara psikologis. (*Ahmad Sabri, 2005 : 71-77*)

C. Pembibitan Guru

Mengingat fungsi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) adalah menghasilkan tenaga pendidik yang mampu mengikuti perkembangan ilmu dan masyarakat, maka sudah sepantasnya memerlukan sistem pengelolaan yang professional dan dinamis, dimana semua perangkat pembelajaran seperti; kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, SDM tenaga pengajar dan semua sarana dan prasarana kiranya tetap menjadi perhatian bersama, baik pihak-pihak yang berkompeten dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan nasional. Hal itu penting agar dapat menghasilkan lulusan berupa tenaga pendidik yang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (*kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.*

Sehingga dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan).

Dalam upaya peningkatan mutu tenaga guru yang berkualitas dan berdedikasi tinggi serta siap pakai, maka sangat diharapkan peran aktif Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) selaku media pengalihan calon-calon guru di negeri ini. Dalam konteks ini menurut Guru Besar FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, M. Furqon H, upaya peningkatan peran LPTK dalam rangka menghasilkan guru yang handal salah satunya adalah dengan penajaman kurikulum. Baru kemudian disusul dengan peningkatan fasilitas, sumber daya manusia (tenaga pengajar), aspek penunjang, dan terakhir manajemen yang kuat, serta senantiasa melakukan upaya-upaya strategis dalam menyongsong dan menyikapi program sertifikasi, mengingat Undang-Undang Guru dan Dosen memungkinkan profesi guru bagi siapa saja yang berkompeten. (<http://www.media-indonesia.com/berita>.)

"Di sinilah tantangan LPTK saat ini". Jadi, fenomena guru yang dominan mengindikasikan kemerosotan nilai dan kuantitas sebenarnya tidak bisa hanya dilihat pada fakta yang ada sekarang. Model pembibitan/pembinaan guru dan adanya lembaga pendidikan tinggi yang mencetak guru seyogianya juga menjadi perhatian serius.

Adanya lembaga pendidikan tinggi keguruan semacam IKIP atau fakultas tarbiyah (IAIN) di masa lalu, tampaknya perlu dipikirkan kembali keberadaannya, yang memang secara khusus akan melahirkan guru-guru yang potensial berkualitas sebagai pengajar dan juga pendidik.

Mengenai masa depan luarannya, seharusnya tidak dirisaukan lagi, terutama karena sudah ada undang-undang guru dan dosen, yang menjamin kesejahteraan guru. Peminat sekolah guru pasti akan kembali meningkat.

Menurut Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Sutjipto (<http://www.unj.ac.id/idx.php>), saat ini baru 50 persen dari guru se-Indonesia yang memiliki standarisasi dan kompetensi. Kondisi seperti ini masih dirasa kurang. Sehingga kualitas pendidikan kita belum menunjukkan peningkatan yang signifikan,. Kurangnya kualitas guru itu disebabkan antara lain sejak

dilakukannya pengangkatan guru bantu beberapa tahun lampau. Pada waktu itu kita kekurangan guru, sehingga pemerintah banyak merekrut guru-guru dari lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Secara pendidikan tidak memenuhi syarat untuk mendidik siswa minimal diploma. Kemudian saat itu, banyak guru SMP yang tidak semuanya sarjana. Belum lagi dilihat dari isi ijazah mereka, karena tak semua guru yang dihasilkan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) memenuhi berkualitas standar. Seperti diketahui bahwa LPTK merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bagi calon pendidik dan calon tenaga kependidikan atau pendidik dan tenaga kependidikan. "Walaupun guru itu sarjana, tapi karena kualitas LPTK-nya kurang memiliki standar, maka mereka juga tak layak mengajar. Para guru itu memerlukan keterampilan dan wawasan pendidikan lebih banyak, selain bidang studinya. Sedangkan guru dari lulusan perguruan tinggi amat terbatas pola pikirnya. Mereka hanya menguasai materi dan jarang memahami makna mendidik.

D. Pengangkatan guru

Sistem pendidikan dasar di Indonesia (dari SD sampai SMA) sebenarnya tidak kalah dari negara maju lainnya. Tetapi pelaksanaan di lapangannya mungkin masih sangat sulit untuk bisa optimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh sulitnya menyediakan guru-guru berbobot untuk mengajar di daerah-daerah. Dan juga soal dana yang terbatas. Salah satu hal yang penting untuk digarisbawahi dalam kultur bangsa Indonesia adalah kita sebagai bangsa besar dengan populasi no.4 di dunia, harusnya berani menjadi bangsa yang mengutamakan pendidikan untuk generasi mendatang.

Menurut Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPT),sekarang wakil menteri pendidikan nasional, Fasli Jalal (<http://www.jawapos.co.id/index.php>) : "Setidaknya ada beberapa masalah guru. Pertama adalah kekurangan guru. Kemudian, distribusinya kurang merata. Lalu, rendahnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,".

Dia menambahkan, permasalahan tersebut terkait dengan rendahnya kompetensi, kesejahteraan, serta manajemen pendidikan yang belum tertata secara baik. Soal kekurangan guru sebenarnya bisa diatasi secara "mudah". Yaitu, tinggal mengoptimalkan perekrutan guru.

Akan tetapi Sutjipto Pada saat ini guru bantu sebanyak 150 ribuan orang yang bakal direkrut menjadi PNS (*Pegawai Negeri Sipil*) itu juga mesti memiliki standarisasi rata-rata, supaya kita memiliki kualitas pendidikan yang bermutu. (<http://www.unj.ac.id/idx.php>),

Dari fakta yang ada, data terakhir 2005 menunjukkan bahwa hanya ada 30 persen (di antara sekitar 2,7 juta) guru di Indonesia yang memenuhi kualifikasi minimum. Kualifikasi minimum yang dimaksudkan di sini adalah setara S-1 atau D-4. Karena itu, pakar pendidikan pusat merencanakan melakukan uji sertifikasi guru-guru yang ada. Sertifikasi itulah yang nanti diharapkan bisa menaikkan jumlah guru dengan kualitas minimum. Sertifikasi tersebut dimaksudkan sebagai pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi terhadap seorang guru. Rencananya, sertifikasi pendidik itu juga menjadi salah satu prasyarat bagi seorang guru untuk memperoleh tunjangan profesi. Akhir tahun ini, diharapkan uji sertifikasi pendidik itu sudah bisa dilakukan.

Dari wacana ini secara tidak langsung menjadi hal yang mengarah kepada dilematis dimana dengan penerapan uji sertifikasi tersebut tidak bisa dipandang enteng oleh para guru. Sebab, jika tiga kali gagal menempuh ujian itu, bisa-bisa seorang guru bisa "diparkir" menjadi sekadar tenaga administrasi. Karena itu, semua guru pada saat ini gencar mempersiapkan diri menghadapi uji sertifikasi mendatang dengan berbagai upaya dan usaha walau terkadang terhalang oleh ketersediaan kesempatan dan waktu untuk melanjutkan berupa studi kejenjang berikutnya yang begitu sulit dan terbatas.

Sebagai suatu ilustrasi dalam menyingkapi problematika peningkatan kualitas guru di Indonesia, kita dapat mengambil suatu iktibar dari *Deny Suwarja*, guru *SMPN 1 Garut* yang pernah menjadi wakil Indonesia dalam pertemuan guru se-Asia. Menurutnya bahwa untuk mengurai kusutnya pendidikan Indonesia, yang paling prioritas dilakukan adalah memperbaiki

kualitas guru. Deny bahkan secara tegas menyatakan, masalah utama yang harus diselesaikan untuk meningkatkan pendidikan Indonesia adalah membenahi para guru. Pembenahan tersebut harus dilaksanakan dalam banyak aspek. "Bagaimana guru mau kreatif menambah wawasan, kalau sore atau malamnya nyambi ngojek untuk menambah nafkah keluarga? Pakai kurikulum apa pun, yang paling penting adalah gurunya. Bahkan, kurikulum 1975 pun masih baik, asalkan gurunya memang benar-benar berkompeten" tegasnya. Rencana sertifikasi guru disambut positif oleh Deny. Namun, dia memberikan catatan kritis. "Niat memberikan uji sertifikasi itu memang bagus, namun jangan sampai ujian tersebut menjadi bibit tumbuh suburnya percaloan uji sertifikasi. Depdiknas harus mengawasi ketat dan menjamin transparansi hasil tes uji sertifikasi tersebut," [.\(http://www.jawapos.co.id/index.\)](http://www.jawapos.co.id/index.)

E. Eksistensi dan Penghargaan Guru

Fenomena guru Indonesia secara makro dewasa ini dapat kita ketahui melalui dari berbagai fenomena dan sumber informasi, baik media cetak maupun elektronik. Mulai dari fenomena gaji yang terus dilanda permasalahan meskipun kebijakan sertifikasi guru telah bergulir, akan tetapi masih saja ada kejanggalan yang harus segera dicarikan solusinya dalam hal manajemen pengembangan karier dan kompetensi seorang guru, bukan lagi sekedar hidup layak/ jaminan kesehatan/ jaminan hari tua akan tetapi juga integritas profesionalitas seorang guru. Tidak sedikit guru yang kemudian bekerja sambil sebagai tukang ojek. Tidaklah juga mengherankan kalau ada di antara mereka yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti menjual soal ujian dan sebagainya. Sementara penyelenggara pendidikan lebih mementingkan surplus sekolah ketimbang meningkatkan kesejahteraan guru. Padahal pendidikan dan keberhasilan pendidikan mencapai sasaran amat ditentukan oleh guru.

Di era globalisasi ini dengan persaingan ketat seperti sekarang, kinerja menjadi satu- satunya cara untuk mengukur mutu seorang guru. Karena itu, status pegawai negeri, swasta, tetap, atau honorer tidak terlalu relevan

dikaitkan gagasan tentang profesionalisme kinerja seorang guru. Di banyak tempat lembaga swasta yang besar dan maju, status pegawai tetap malah membuat lembaga pendidikan swasta tidak mampu mengembangkan gurunya secara profesional sebab mereka telah merasa mapan. Demikian juga yang menjadi pegawai negeri, banyak yang telah merasa nyaman sehingga lalai mengembangkan dirinya. Oleh karena itu guru harus kembali pada jati dirinya yaitu memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu ramah, terbuka, akrab, mau mengerti, dan mau belajar terus-menerus agar semakin menunjukkan jati diri keguruannya.

Di kalangan masyarakat negara maju, pendidik, guru atau profesor, sangatlah dihormati. Mungkin hal ini disebabkan karena rasa sadar diri yang tinggi dari masyarakat negara maju mengenai betapa pentingnya pendidik dalam membentuk generasi mendatang. Jangan lupa juga, hampir semua penemuan penting yang menempatkan negara maju (seperti Amerika Serikat) berasal dari riset yang dilakukan oleh mahasiswa dan profesor-profesor di universitas.

Prof. Dr. H. Mohamad Surya, Ketua Umum PB PGRI mengatakan (<http://www.detikpublishing.com/index.php>) : diharapkan melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan studi akan menambah motivasi guru meningkatkan pendidikan anak didik dan mutu sekolah menjadi lebih baik disamping profesionalisme diri sendiri'. Profesionalisme dan terjaminnya kesejahteraan guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional antara guru dan murid, dengan demikian proses belajar mengajar berjalan lancar tanpa ada gangguan perilaku.

Sejauh ini, pemerintah hanya mampu menuntut guru untuk ikut sertifikasi, tetapi ia gagal memberi penghargaan dan perlindungan atas profesi guru (ada ketidakseimbangan kuota guru negeri dan swasta, sedangkan swasta dibatasi kesejahterannya dengan aturan alokasi jam mengajar dan status kepegawaian). Pemerintah memiliki tugas mulia dalam menyejahterakan nasib guru. Negara mampu melakukan itu jika ada keinginan politik yang kuat. Ongkos sosial dan

politik pada masa depan akan lebih ringan jika pemerintah mampu memberi perlindungan dan kemartabatan profesi guru, terutama memberi jaminan ekonomi minimal agar para guru dapat hidup bermartabat, sehingga mereka dapat memberi pelayanan bermutu bagi masyarakat dan negara.

F. PENUTUP

a. Kesimpulan

Setidaknya ada beberapa masalah guru. Pertama adalah kekurangan guru. Kemudian, distribusinya kurang merata. Lalu, rendahnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

Sudah bukan rahasia lagi jika gaji guru sangat rendah saat ini, sehingga banyak berprofesi tambahan yang membuat konsentrasi mengajar berkurang. Untuk bisa mendapatkan penghasilan yang berlipat-lipat itu, pemerintah menetapkan standar-standar tertentu yang harus dipatuhi, di antaranya guru harus seorang sarjana. Dalam hal peningkatan image, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan profesi dan kesejahteraan guru amatlah berhasil. Kini jurusan pendidikan guru yang ada di perguruan tinggi, dibanjiri peminat, melebihi minat kepada fakultas kedokteran, teknik, atau ekonomi. Dalam upaya peningkatan mutu tenaga guru yang berkualitas dan berdedikasi tinggi serta siap pakai, maka sangat diharapkan peran aktif Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK). Pada saat sekarang ini secara tidak langsung menjadi hal yang mengarah kepada dilematis dimana dengan penerapan uji sertifikasi tersebut tidak bisa dipandang enteng oleh para guru. Sebab, jika tiga kali gagal menempuh ujian itu, bisa-bisa seorang guru bisa "diparkir" menjadi sekadar tenaga administrasi

Sekarang kembali kepada guru itu sendiri bagaimana cara menyikapi diri sebagai pendidik yang profesional, untuk itu guru wajib terus mengembangkan diri di era globalisasi ini, kalau tidak terus mengembangkan diri, guru bisa tertinggal dari siswanya, meskipun belum terima sertifikat profesional apalagi sudah terima sertifikat profesional

sudah diterima. Tidak ada alasan untuk tidak sempat tapi harus melakukan sesuatu yang sudah menjadi tuntutan bahwa pengetahuan guru harus selalu terasah dan up to date.

Mudah-mudahan pemerintah terus meningkatkan perhatian dan pemikirannya kepada profesi guru dari tahun ke tahun agar guru-guru di negeri tercinta ini kembali pada jati dirinya, tidak saja kemudahan dalam mengikuti sertifikasi namun mungkin ada hal-hal lain misalnya menambah kuota bagi guru-guru swasta atau yang lainnya yang dapat membuat guru-guru kembali bersemangat dalam bekerja dan berkeaktifitas untuk menambah pengetahuan dalam pembelajarannya.

b. Saran

Dalam upaya pembaruan dan kualitas pendidikan di negeri ini, bukan saja konsep pendidikan berbasis kompetensi atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pernah didengung-dengungkan, tetapi juga kiranya menjadi pemikiran bagi semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan terutama pemerintah sehingga sangat diharapkan melahirkan dan merealisasikan berbagai terobosan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Pemerintah kiranya tidak hanya sebatas mewacanakan (*lip service*) untuk mencoba menyetarakan profesi guru dengan profesi-profesi lainnya seperti dokter, wartawan atau profesi yang terkesan prestisius dan menjanjikan. Tapi Pemerintah lewat perpanjangan lembaga-lembaga yang terkait seyogyanya menciptakan suatu motivasi bagi para guru terutama menyangkut apresiasi guru berupa peningkatan penghasilan guru, pengoptimalan mekanisme perekrutan guru, dan mengatasi berbagai masalah seperti ketimpangan distribusi, kompetensi, sekaligus meningkatkan kompetensi / mutu guru.

Dan dalam upaya penciptaan dan pembibitan tenaga guru yang professional, berkompetensi dinamis, maka perlu kiranya bagi setiap pengelola Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) untuk

mengoptimalkan proses pencetakan calon guru yang siap pakai dengan memiliki mutu pendidikan yang standar dengan tuntutan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Johnson, Louanne. 2009. *Pengajaran yang kreatif dan menarik (terjemahan)*, Jakarta: Indeks
- Sabil, Zakaria : *slide materi kuliah Anatomi pendidikan*, 2006
- Sabri, Ahmad. 2005. *Strategi belajar mengajar ;micro teaching*, Jakarta : Quantum Teaching
- Soetjipto. 2004. *Profesi Keguruan*, Jakarta : Rineka Cipta
- <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=25906> Tajuk: Lagi, Berita Tentang Guru
- <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=92652> HUMANIORA - Pendidikan Kurikulum LPTK Sebaiknya Fokus ke Kompetensi Profesional, M. Furqon H
- <http://www.unj.ac.id/idx.php?name=News&file=article&sid=18> UNJ di Media Massa: Rektor UNJ, Sutjipto : 50 Persen Guru Tak Miliki Standar Pendidikan
- <http://www.detikpublishing.com/index.php> Motivasi Guru, Prof. Dr. H. Mohamad Surya